OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH SEKTOR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Arifah Fitri Rizli

Program Studi Keuangan Daerah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email

aeferrizli@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (GAP): The author focuses on problem the lack of optimization in terms of collecting non-metal mineral and rock taxes in Karimun Regency. Purpose: The study aims to know out what local governments are doing to optimize mineral tax revenues rather than metal and rock taxes in Karimun Regency. Method: This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach. With the analysis of primary and secondary data obtained through the results of interviews, observations and documentation. Result: Some of the obstacles faced by the Regional Revenue Agency are limited human resources, slow licensing process, the lack of optimal monitoring and supervision, and lack of public awareness. Conclusion: That the collection of tax on non-metallic minerals and rocks in the last few periods has not gone well. This can be seen from the realization of the tax that has not been in accordance with the target. Efforts to optimize the receipt of non-metal mineral and rock taxes and bills by the Regional Revenue Agency are carried out in terms of the certainty and clarity of the Law, the intellectual level of the community, the quality of tax officers, and the tax administration system.

Keywords : *Optimization, Non-metallic Mineral and Rocks Tax, Original Regional Income.*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Penulis berfokus kepada permasalahan kurangnya optimalisasi dalam hal pemungutan pajak minerba di Kabupaten Karimun. **Tujuan :** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Karimun. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dengan analisis data primer dan sekunder yang diperoleh melalui hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Beberapa kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah ialah keterbatasan sumber daya manusia, lambatnya proses perizinan, kurang optimalnya monitoring dan pengawasan, dan kurangnya kesadaran masyarakat. **Kesimpulan:** Pemungutan pajak minerba dalam beberapa kurun waktu terakhir belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi pajak minerba yang belum sesuai dengan targetnya. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak minerba oleh Badan Pendapatan

Daerah dilakukan dari segi kepastian dan kejelasan Undang-Undang, tingkat intelektual masyarakat, kualitas petugas pajak, dan sistem administrasi pajak.

Kata kunci : Optimalisasi, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Berdirinya suatu negara tentunya memiliki suatu tujuan. Tujuan di setiap negara tentu saja berbeda-beda antara negara satu dengan yang lainnya. Hal ini disesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat dan landasan hidup yang bersumber pada nilai-nilai luhur negara tersebut. Tujuan negara secara umum adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Pembukaan UUD 1945 sudah tertera dengan jelas tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya dengan tercapainya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Indonesia memiliki berbagai potensi nasional dengan jumlah yang melimpah. Letak geografis yang strategis menunjukkan betapa kaya Indonesia akan sumber daya alam. Apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dapat digolongkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah digunakan disebut SDA yang dapat diperbaharui. Sedangkan, Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui jumlahnya terbatas. Sumber daya alam ini akan habis suatu saat dan sulit atau tidak mungkin dibuat kembali. Maka dari itu dibutuhkan pengawasan dari pemerintah dalam pelaksanaannya (Giyarto, 2015, p. 1).

Pemerintah daerah mendapatkan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri yang berkedudukan sebagai daerah otonom. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengertian otonomi daerah adalah “hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Salah satu upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ialah memaksimalkan pengelolaan pemungutan pajak daerah. Pajak daerah sendiri terbagi menjadi beberapa macam, salah satunya pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan atau sering disebut dengan pajak Minerba merupakan pengganti dari pajak pengambilan bahan galian golongan C. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebelumnya diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Berada di wilayah yang terletak di antara Selat Malaka dan Singapura, Kabupaten Karimun mempunyai banyak potensi yang perlu dikembangkan diantaranya sumber daya alam. Kabupaten Karimun kaya akan potensi sumber daya alam bahan galian diantaranya bauksit, timah, granit, pasir darat dan pasir laut. Potensi yang dimiliki Kabupaten Karimun menjadikan pengambilan hasil pertambangan dan bahan galian pasir sebagai objek pajak yang harus dipungut oleh pemerintah daerah. Pemungutan objek dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah sektor pajak di Kabupaten Karimun. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten

Karimun sebagai pelaksana pemungutan pajak daerah harus mengupayakan peningkatan penerimaan pajak di Kabupaten Karimun. Perlu adanya usaha yang lebih intensif dari BAPENDA untuk mengoptimalkan dalam mengelola pajak khususnya pajak minerba yang merupakan penyumbang terbesar pendapatan daerah Kabupaten Karimun itu sendiri. Proses pemungutan pajak tidak terlepas dari aparat pemerintah daerah dan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan *Convergent Parallel Mixed Method* dan menganalisis data melalui *joint display* yakni menyajikan kedua kelompok data baik itu kualitatif ataupun kuantitatif (Sugiyono, 2013). Dalam tipe convergent ini Creswell menjelaskan bahwa peneliti dalam waktu yang sama mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif, menganalisis secara terpisah, dan membandingkan hasilnya untuk mengetahui apakah temuannya itu saling melengkapi atau tidak (Creswell John W., 2018).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara semi terstruktur. Penulis melakukan pengamatan yang meliputi pengamatan secara umum mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, setelah itu dimulai dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian dan selanjutnya dilakukan pembatasan objek pengamatan dan dilakukan pencatatan. Dokumen tersebut dapat berupa laporan-laporan terdahulu, peraturan perundang-undangan, buku-buku, arsip, dan dokumen tertulis lainnya yang sekiranya dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini dokumen-dokumen yang akan digunakan antara lain berupa data milik dinas pendapatan Kabupaten Karimun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan terhambatnya penerimaan pajak minerba di Kabupaten Karimun. Sumber daya manusia merupakan faktor yang utama untuk mencapai tujuan akhir. Kurangnya sumber daya manusia sebagai pengawas pemungut pajak menyebabkan kurang optimalnya perolehan pajak minerba. Dilihat pada kejadian yang terjadi di lapangan bahwa masih ada penambang mineral bukan logam dan batuan yang tidak memiliki izin usaha sehingga tidak ada pajak yang dibayar dan hasil alam semakin menipis sehingga merugikan daerah Karimun. sumber daya manusia yang ada sangatlah kurang untuk melakukan pengawasan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan karena masyarakat menganggap bahwa yang dilakukannya tidak merugikan pihak manapun. Ketegasan petugas dalam melakukan pengawasan dan pemungutan pajak sangat berpengaruh terhadap pemasukan yang diperoleh pemerintah daerah. Karena tidak semua masyarakat bersedia untuk mematuhi aturan yang berlaku makanya sangat dibutuhkan kemampuan dan keterampilan serta

jumlah petugas yang memadai untuk mengatasi hal tersebut sehingga dapat memberikan penjelasan secara detail mengenai peraturan pajak yang berlaku di Kabupaten Karimun.

3.2 Rumitnya Proses Perizinan Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi dasar dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan pengolahan bahan tambang. Sehingga dibutuhkan Surat Izin Pertambangan Daerah guna memperlancar kegiatan produksi tambang. Dalam hal ini masih ditemukan para penambang yang tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan sehingga dalam proses pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan menjadi terhambat dan dana yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak terlaksana dengan optimal dikarenakan izin penambangan yang tidak dimiliki oleh para penambang *illegal* ini, karena untuk memungut pajak tersebut para penambang harus sudah memiliki izin beserta Nomor Pokok Wajib Pajak sehingga bisa dipungut. Penambang liar atau *illegal* di wilayah Kabupaten Karimun sudah mulai berkurang. Pemilik yang telah memegang SIPD dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 yang lalu pemilik tambang dengan SIPD yang masih terdaftar mencapai empat puluhan, namun di tahun 2020 saat ini jumlahnya mulai berkurang dikarenakan masa berlakunya yang telah habis dan sebagian penambang yang sudah mendaftar menunggu SIPD miliknya terbit. Perubahan aturan mengenai izin pertambangan yang semakin diperketat juga menjadi faktor berkurangnya pemilik tambang SIPD yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebagian pemilik tambang SIPD yang masa berlakunya habis telah melakukan reklamasi pascatambang sebagai bentuk penataan ruang kembali,

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral reklamasi ialah “kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya”. Dengan adanya reklamasi tersebut kawasan pascatambang dapat kembali pulih fungsi lingkungannya dan tidak membahayakan masyarakat di sekitar tambang.

Proses lambatnya perizinan termasuk perizinan mendapatkan SIPD dan dalam hal memperpanjang SIPD yang telah habis masa berlakunya atau kadaluarsa. Rangkaian dalam penerbitan izin juga dikatakan cukup rumit karena melewati beberapa proses dan tahapan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Pendi selaku wajib pajak pada Selasa, 12 Januari 2021 mengatakan bahwa “kemarin saya mengurus hampir berbulan-bulan, karena dokumen persyaratannya rumit, dan prosesnya sangat lama”.

Tahapan yang dilalui dalam penerbitan izin pertambangan harus melewati evaluasi dokumen perizinan didasarkan pada kriteria-kriteria sehingga disesuaikan dengan dokumen yang disampaikan. Oleh sebab itu proses ini memakan waktu yang cukup lama karena prosesnya bertahap dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang mempunyai kewenangan sepenuhnya. Operasi sidak tersebut juga sering mengalami kegagalan yang dikarenakan kebocoran informasi dari pemilik tambang satu ke yang lainnya. Sehingga banyak dari mereka yang sudah mengetahui hal tersebut tidak beroperasi pada saat diadakan sidak, atau sebagian terpaksa melewati jalan kampung sebagai jalan pintas untuk keluar dari area tersebut.

Selain itu pengawasan setiap harinya juga hanya dilakukan oleh pihak Bapenda saja yaitu para petugas pajak tanpa ada bantuan dari pihak manapun. Sehingga hal tersebut menjadi kelemahan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak atas bahan galian mineral mengingat keterbatasan jumlah personil dan dilakukan sesuai jam kerja. Pengawasan tersebut tentu belum

efektif jika untuk menggenjot penerimaan pendapatan daerah sektor mineral bukan logam dan batuan

3.3 Kurang Optimalnya Pengawasan

Pembayaran pajak ninerba oleh pemilik tambang SIPD selaku wajib pajak dilakukan melalui *self assessment system*. Maka dikatakan perlu dilakukannya pengawasan yang intensif oleh Bapenda Kabupaten Karimun. Pengawasan saat ini masih bersifat internal yaitu dari pihak Bapenda saja. Pengawasan ini termasuk dalam jenis pengawasan langsung karena dilakukan oleh pemerintah di tempat kegiatan berlangsung dengan mengadakan inspeksi maupun pemeriksaan di lapangan. Pengawasan ini hanya dilakukan oleh Tim gabungan Bapenda Kabupaten Karimun melalui kegiatan sidak mendadak. Operasi sidak mendadak ini dilaksanakan secara periodik oleh Tim gabungan dari Bapenda Kabupaten Karimun dengan bantuan Patroli Pengawasan Kepolisian Resor Kabupaten Karimun. Selain itu medan yang sulit dijangkau oleh petugas menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan. Jalur khusus kendaraan berat di Kabupaten Karimun hampir sebagian mengalami kerusakan ringan, sedang hingga berat. Kerusakan paling banyak ditemukan di wilayah pertambangan, karena area tersebut yang menjadi jalur keluar masuknya armada truk.

Kerusakan tersebut menyebabkan proses pengawasan menjadi terganggu karena harus memakan waktu yang cukup lama untuk meninjau ke lokasi tambang. Hal ini dikarenakan tidak semua objek pajak dapat dijangkau dengan mudah oleh petugas. Jalur khusus tersebut juga termasuk jalur utama yang juga dilewati oleh masyarakat pada umumnya

3.4 Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Dalam hal ini masih banyak pemilik tambang sebagai wajib pajak enggan mau membayar pajak atas bahan galian mineral bukan logam dan batuan. Kebanyakan dari mereka ialah wajib pajak lokal yang berdomisili disekitaran area pertambangan, sehingga mereka beralasan memiliki hak untuk kemanfaatan lahan yang ada di wilayahnya. Penolakan dari masyarakat berupa dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai warga lokal setempat, sehingga mereka berargumentasi pemerintah tidak wajib menarik pajak atas lahan yang menjadi hak milik mereka.

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak merupakan faktor penghambat utama yang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Kondisi ini dilatat belakangi kurangnya pengetahuan dari sebagian masyarakat kemana ujungnya kemanfaatan pajak yang mereka bayar. Pajak daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah yang nantinya akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk aspek pembangunan berbagai sarana prasarana umum.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada penelitian yang pertama penelitian Riska terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada metode penelitian ini bersifat Kuantitatif, dengan rancangan Korelasional, menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen yaitu pajak bahan mineral bukan logam & batuan dan retribusi bahan galian c terhadap variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah.

Pada penelitian selanjutnya penelitian Andriani juga terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng berdasarkan Perencanaan dalam penentuan target pajak mineral bukan logam dan batuan tiap tahun masih kurang maksimal meski adanya dasar yang digunakan sebagai penentuan target pajak namun realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan tiap tahun mengalami penurunan sehingga target tiap tahun tidak pernah ditingkatkan. Pelaksanaan dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan dilihat dari pembagian kerja belum cukup efektif hal ini dikarenakan hanya ada satu orang yang bertugas sebagai kordinator pajak tiap Kecamatan, dari segi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu adanya perubahan peraturan yang terjadi pada tahun 2012 menyebabkan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan. Pengawasan dan pemberian sanksi yang dilakukan oleh DPPKAD belum maksimal, karena pemantauan terhadap wajib pajak hanya dilakukan apabila ada kegiatan pertambangan serta sanksi yang diberikan hanya berupa teguran sehingga mengakibatkan penunggakan pajak sampai bertahun-tahun. Pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan belum optimal, masih perlunya peningkatan di semua bidang, baik perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh di lapangan terkait dengan optimalisasi pendapatan daerah sektor mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Dalam mengoptimalkan pendapatan daerah sektor minerba, Bapenda masih menghadapi hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam upaya mencapai target. Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah tingkat kesadaran wajib pajak yang masih kurang dalam membayar pajak, kurangnya kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan disebabkan Izin Usaha Pertambangan semakin diperketat sehingga adanya keterbatasan dalam penerbitan Surat Izin Pertambangan Daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak minerba sudah dioptimalkan namun masih lemah dalam pelaksanaannya. Untuk mengatasi hal tersebut Bapenda menjalin kerjasama dengan membentuk tim intensifikasi pajak yang terdiri dari petugas Bapenda itu sendiri, Kejaksaan Kabupaten Karimun, Kepolisian Resor dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menindaklanjuti secara hukum terhadap wajib pajak yang tidak taat membayar pajak. Penerimaan pajak minerba di Kabupaten Karimun masih kurang tidak sebanding dengan potensi yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta
- Creswell. John W. 2013. *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Gorontalo: PT. Macanan Jaya Cemerlang
- Elmi, Bachrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta : UI-Press
- Giyarto. 2015. *Sumber Daya Alam dan Pemanfaatannya*. Klaten : Saka Mitra Kompetensi.
- Masyuhri dan Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian - Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung : PT Refika Aditama
- Nazir, Moh. 2017. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahayu, Kurnia. 2010. *Perpajakan*. Jakarta : Kencana
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Winardi. 2004. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup

B. DOKUMEN-DOKUMEN

- Dokumen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Dokumen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Dokumen Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Dokumen Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Dokumen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah
- Dokumen Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2021

C. SUMBER-SUMBER LAIN

- <http://www.alodokter.com/covid-19>. Diakses 29 September 2020
- <http://www.bapenda.karimunkab.go.id>. Diakses 29 September 2020
- <http://www.mediacentre.batam.go.id/berita-realisasi-pad-kabupaten-karimun>. Diakses 30 Oktober 2020